

ANALISIS PERAN GREJA¹ KRISTEN JAWI WETAN (GKJW) SEBAGAI GEREJA BERBASIS AGRARIS WAWUK KRISTIAN WIJAYA[⊗])

Abstract: *Greja Kristen Jawi Wetan (GKJW) is a church based on agricultural context in East Java. It is acknowledged that during some recent years GKJW has no significant role in developing agricultural society surrounding it.*

Seeing historical context of this founding, however, GKJW was indeded rooted and growing in agricultural Christian villages. GKJW had also an important role in helping the peasants prosperity as demonstrated by pioneering movement of Coolen in history of Desa Ngoro, wich was influenced in forming Christian villages as Mojowarno and other Christian villages in East Java, too.

Van Akkeren noted that in the years before New Order, GKJW Christian villages had a strong role in building prosperity of peasant's society and also pioneered the more advanced agriculture. But in New Order era period and years following it, even now, it is acknowledged that social role of GKJW as the agriculture-based Church in East Java declined. Its effect on agricultural sector surrounding it is not real anymore.

In this paper, two important factor will be analyzed as fundamental causes of GKJW's failure in doing its role in present time's agricultural sector. Those two fundamental factors are GKJW's theological basis and church vision which are less clear in responding the context of its existence in the mids of agricultural and peasantry society surrounding it.

Kata Kunci: *GKJW, Gereja dalam konteks, Coolen, Emde, teologi kontekstual agraris, visi Gereja, Gereja gerakan petani.*

Pendahuluan

Dalam seminar HUT GKJW Ke-75 di Balewiyata Malang, Dr. Bambang Ruseno Utomo, Direktur Institut Pendidikan Theologia Balewiyata yang juga mantan Ketua Majelis Agung GKJW, mengemukakan bahwa selama 75 tahun GKJW tidak banyak memberi sumbangan terhadap sektor agraris yang

[⊗]) Wawuk Kristian Wijaya adalah Mahasiswa Master of Divinity pada Program Pasca Sarjana Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.

¹ Dalam penjelasan *Tata Gereja GKJW*, pemakaian nama Greja dalam nama diri GKJW mengacu kepada Bahasa Jawa, yang ditulis dan dibaca dengan pelafalan Jawa. Lihat *Tata dan Pranata*, Majelis Agung GKJW, 1996, hal. 14.

melingkupinya.² Pernyataan ini merupakan pernyataan jujur tentang keadaan GKJW, Gereja berbasis jemaat pedesaan di Jawa Timur, meski perlu dikoreksi apakah benar selama 75 tahun GKJW tidak berperan pada sektor pertanian.

Secara terbatas saya mencoba menganalisis sebab-sebab GKJW tidak lagi mampu memberi sumbangan bagi konteks agraris di Jawa Timur. Apa yang perlu dilakukan GKJW untuk mewujudkan peran nyata dalam dunia agraris yang melingkupinya? Tulisan ini saya beri judul *Analisis Peran GKJW Sebagai Gereja Berbasis Agraris* dengan tujuan untuk mendalami beberapa faktor kegagalan GKJW berperan dalam bidang agraris serta bagaimana secara konseptual mengubah faktor kegagalan itu sehingga GKJW mampu berperan secara riil dalam dunia agraris di Jawa Timur.

Konteks Historis GKJW Sebagai Gereja Berbasis Agraris³

Konteks GKJW sebagai Gereja berbasis agraris berkembang dari sejarah Gereja Ngoro dan Gereja Mojowarno, maupun berdirinya desa-desa Kristen yang lain. Berdirinya Jemaat Ngoro sebagai embrio berdirinya GKJW menjadi tonggak penting untuk melihat GKJW sebagai gereja berbasis agraris. Sejarah Ngoro terkait dengan upaya Coolen membumikan Injil dengan budaya agraris setempat dalam ritus-ritus bercocok tanam maupun dalam usaha budidaya padi yang hasilnya nyata. Demikian pula sejarah Gereja di Mojowarno yang bertumbuh dari usaha agraris mencetak sawah dan mengupayakan produksi padi menjadi pelajaran yang penting untuk mendalami GKJW sebagai Gereja kaum tani.

Sejarah berdirinya Ngoro dirintis Coenraad Laurens Coolen ketika dirinya menjadi sinder blandong. Pada tahun 1827 Coolen yang memiliki ijin untuk membuka lahan pertanian seluas 1.420 hektar membuka hutan Ngoro yang subur dan mencetak persawahan dan tegal-tegal. Coolen memberdayakan penduduk di Ngoro sebagai penggarap-penggarap sawahnya. Para penduduk di sekitar Ngoro diperlakukan Coolen dengan amat baik sebagai penggarap-penggarap persawahan. Sistem bagi hasil yang diberikan Coolen kepada para petani dirasa sangat menguntungkan. Terlebih Coolen menyediakan peralatan pertanian dan ternak bagi para petani. Sebagai pemimpin desa Coolen juga menjadi pelindung bagi penduduknya dari bermacam-macam bahaya. Pada tahun 1852 ketika Jawa Timur dilanda paceklik penduduk Ngoro dan sekitarnya tidak kelaparan karena lumbung pangan di Ngoro yang dibangun Coolen mampu menyediakan pangan yang cukup. Penduduk sekitar membeli dengan harga yang murah bahkan yang tidak mampu diberi secara cuma-cuma. Coolen juga memperkenalkan kekristenan melalui ritus-ritus agraris setempat, sehingga kekristenan berpengaruh menjadi pemicu etos kerja bagi dunia agraris di Ngoro.

² Bambang Ruseno Utomo, *GKJW Kini dan Kedepan*, Makalah Seminar HUT GKJW Ke-75, hal. 5.

³ Pada bagian ini secara spesifik saya hanya menyinggung bagian sejarah terkait konteks agraris yang menjadi riwayat berdirinya Gereja GKJW dengan mengacu pada: Philip van Akkeren, *Dewi Sri dan Kristus*, (Jakarta:1994), hal. 67-92 dan 131-194.

Selanjutnya sejarah Desa Mojowarno sebagai cikal bakal GKJW pun memiliki akar agraris yang kuat melalui pencetakan sawah-sawah baru dengan pembukaan hutan Keracil yang mirip usaha Coolen. Pendirian desa-desa Kristen lainnya di Jawa Timur memiliki corak yang hampir sama dengan usaha mencetak sawah dengan membabat hutan seperti perintisan Gereja di Ngoro. Pendirian lumbung-lumbung pangan menjadi ciri khas desa-desa Kristen pada masa itu. Model pendirian lumbung pangan seperti model Coolen di Ngoro menyebar ke desa-desa Kristen. Wujud peninggalan lumbung pangan itu di beberapa desa Kristen masih menyisakan bekas bangunan, seperti di lingkungan GKJW Sindurejo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri⁴, juga di beberapa tempat lain. Tetapi sayangnya sekarang lumbung-lumbung tersebut sudah tidak berfungsi sama sekali.

Dalam catatan van Akkeren mengenai konteks agraris di GKJW disebutkan bahwa perluasan Gereja Kristen di Jawa Timur ini sangat berhasil berkat peningkatan kesejahteraan sosial yang lebih besar, solidaritas sosial, gotong royong, ketertiban, dan pembangunan di komunitas pemukiman-pemukiman desa Kristen maupun dalam keluarga-keluarga Kristen⁵. Disebutkan pula bahwa jemaat-jemaat pemukiman terbuka bagi orang-orang miskin. Di kawasan-kawasan irigasi Jawa Timur, pada tahun 1861 ada empat puluh jemaat pemukiman yang melakukan pola-pola tersebut. Lumbung-lumbung padi rumah tangga didirikan di sebelah rumah dan tercantum dalam tata ruang pemukiman yang dirancang pemimpin komunitas. Gerakan gereja benar-benar mendasarkan diri pada gerakan membangun desa yang berarti juga membangun bidang pertanian.

Selanjutnya van Akkeren mencatat, dalam perkembangannya desa-desa Kristen sikap agrarian tradisional mulai mendapat tantangan yang jauh lebih gigih daripada di desa-desa bukan Kristen. Desa-desa Kristen mulai berminat pada model pertanian yang lebih maju. Van Akkeren memaparkan, sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua telah mulai diupayakan pengembangan metode-metode pertanian yang baru. Pada tahun 1960-an van Akkeren menjumpai bahwa di Desa Kristen Wonorejo telah berdiri koperasi desa yang sudah berjalan lancar dan dikenal memiliki nama baik dikelola para pemuda Kristen. Ini menjadi salah satu fakta yang disebutkan van Akkeren dari banyaknya fakta yang erat antara pendidikan agama dengan modernisasi pertanian serta komunitas pedesaan pada masa itu⁶. Fakta lain juga dikemukakan van Akkeren mengenai prestasi Tunjungrejo, sebuah desa Kristen di Lumajang, dengan keunggulan sawah-sawah yang luas dan berkualitas dengan irigasi yang terbangun dengan baik. Disimpulkan bahwa desa-desa Kristen sesungguhnya memiliki tanggung jawab sosial yang umumnya lebih baik dari desa-desa lainnya⁷. Walau kebenarannya

⁴ Lihat *Duta GKJW*, Edisi Lima Tahun 2007, hal. 30-31.

⁵ Philip van Akkeren, *Dewi Sri dan Kristus*, (Jakarta:1994), hal. 157.

⁶ *Ibid.*, hal. 278.

⁷ *Ibid.*, hal. 279.

masih harus dibuktikan, yang menarik buat saya adalah bahwa faktor pendorong kemajuan peran GKJW di bidang agraris ini disebutkan oleh van Akkeren sebagai berikut:

Kita percaya bahwa alasan di balik itu ternyata terkait dengan iman atas kemenangan Kristus terhadap “kuasa-kuasa”, bahkan terhadap kakuatan dahsyat kekuasaan tradisional Dewi Sri di desa-desa Jawa.⁸

Menilik pendalaman historis di atas, ternyata tidak benar bahwa selama 75 tahun GKJW kehilangan perannya dalam sektor agraris, termasuk di dalam GKJW sendiri seperti dikemukakan Dr. Bambang Ruseno Utomo. Jangka waktu GKJW kehilangan peran di sektor agraris tidak selama 75 tahun bila mengacu kepada paparan van Akkeren. Tetapi entah sejak kapan dan bagaimana pola-pola keterkaitan antara pendidikan agama dengan pola agraris yang maju ini menghilang begitu saja dari GKJW. Seingat saya setelah tahun 1990-an saya tidak lagi menjumpai model-model pembinaan gerejawi semacam itu di dalam Gereja GKJW. Saya menduga bahwa ada kemungkinan melenyapnya peran agraris GKJW terjadi paska tahun 1970-an seiring menguatnya peran Negara Orde Baru yang berhasil membangun sektor pertanian melalui Revolusi Hijau. Namun dugaan ini perlu diteliti lebih lanjut apakah memang demikian faktanya.

GKJW di Tengah Konteks Agraris Jawa Timur

Dengan melenyapnya upaya Gereja yang meninggalkan pola-pola keterkaitan antara pendidikan agama dengan pola agraris serta kehidupan komunitas desa, GKJW mengalami kemunduran peran dalam konteks agraris. Setelah Orde Baru tumbang kemunduran peran GKJW ini sangatlah kentara. Sebagai Gereja berbasis agraris GKJW mengalami kemunduran yang luar biasa. Kemunduran GKJW sebagai Gereja berbasis agraris terungkap dari tulisan Dr. Bambang Ruseno Utomo. Ia menyebutkan bahwa secara sosial ekonomi, masalah kemiskinan berdampak luas bagi GKJW yang menyebabkan desa-desa Kristen kehilangan vitalitas dan harapan⁹. Disebutnya pula bahwa desa-desa Kristen yang dulunya menjadi perintis kesejahteraan dan kemakmuran sosial bagi masyarakat sekitarnya kini menjadi kantong-kantong kemiskinan, banyak pengangguran terbuka dan terselubung, yang menyebabkan maraknya penyakit sosial seperti perjudian dan kriminalitas. Di *pasamuwan* Kristen tempat penulis tinggal kenyataan ini nyata terjadi dengan banyaknya jemaat yang menjadi TKI dan beberapa warga gereja yang sempat terlibat kriminalitas seperti pencurian dan juga perjudian.

⁸ *Ibid.*, hal. 280.

⁹ Bambang Ruseno Utomo, *GKJW Kini dan Kedepan*, Makalah Seminar HUT GKJW Ke-75, hal. 5.

Hal yang lebih menyedihkan, terungkap fakta bahwa jumlah warga GKJW juga mengalami kemerosotan dari yang pernah dikatakan berjumlah 250 ribu jiwa menjadi 150 ribu dan setelah agak serius dicatat jumlahnya menjadi 134 ribu jiwa pada tahun 2004¹⁰. Penurunan ini harus didalami lebih jauh apakah terkait soal merosotnya kesejahteraan masyarakat Kristen di pedesaan atau karena yang lainnya. Tetapi mengingat arus urbanisasi maupun migrasi yang cukup tinggi, juga merosotnya penggembalaan gerejawi dalam hal kesejahteraan bisa jadi turunya jumlah warga GKJW tersebut memang karena faktor ketidakmampuan Gereja berperan pada sektor agraris yang berimbas pada kekecewaan warganya di pedesaan, sehingga memilih berpindah gereja yang lebih menjamin kepuasan batinnya bahkan berpindah agama.

Saya kira realita yang menyedihkan ini merupakan cermin dari konteks agraris di Jawa Timur. Menurut data terakhir jumlah penduduk Jawa Timur 37.478.737 jiwa, 48, 83 % di antaranya bermata pencaharian sebagai petani, dengan angka kemiskinan menurut BPS Jawa Timur mencapai 19%¹¹. Kita tahu bahwa biasanya angka kemiskinan yang dicatat BPS ini bukanlah angka riil, melainkan angka politis atau angka statistik yang keakuratannya sering diragukan karena sering secara kualitatif tidak sesuai dengan kenyataan kemiskinan di lapangan, sehingga jumlah kemiskinan bisa diperkirakan mencapai lebih besar dari angka 19%. Ini berarti penduduk yang miskin bisa mencapai lebih dari 8 juta jiwa mengingat keadaan ekonomi yang sedang sulit seperti sekarang. Bila menilik Berita Resmi Statistik September 2006 yang menyebutkan 63,41% penduduk miskin ada di pedesaan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar orang miskin adalah petani dan sebagian besar petani adalah orang miskin. Kenyataan yang memprihatinkan ini belum ditambah dengan kenyataan rawan pangan yang terjadi di beberapa daerah Jawa Timur yang terjadi beberapa tahun terakhir ini¹².

Konteks agraris di Jawa Timur ditunjukkan dengan luas lahan persawahan, di mana pada tahun 2003 (berdasarkan data Dinas Pengairan tahun 2003 s/d bulan Juni) seluas 2.422.423 hektar. Dan luas lahan pertanian non-sawah maupun perumahan termasuk lahan kering seluas 2.258.784,46 hektar, digunakan antara lain untuk perikanan atau rawa-rawa/danau/waduk 9.583,90 hektar (0,42%) untuk ladang/tegalan/pertanian tanah kering 1.144.861,63 hektar (50,68%), perkebunan 158.194,22 hektar (7%), permukiman/terbangun 571.901,33 hektar (25,32 %), kebun campur 60.560,16 hektar (2,68%), kolam/tambak 73.760,58 hektar (3,27 %) padang rumput/tanah kosong 23.883,34 hektar (1,06%) tanah tandus/tanah rusak/tambang 126.346,34 hektar (5,73%) dan lain-lain 86.693,24 hektar (93,84%) (prosentase dihitung dari total luas lahan non sawah)¹³. Vitalnya sektor

¹⁰ *Ibid.*, hal. 5.

¹¹ www.jatim.go.id, diakses 20 Desember 2007.

¹² Kemiskinan ini juga menggerogoti desa-desa Kristen jemaat GKJW, bahkan warganya menjadi penerima beras untuk kaum miskin (raskin). Di desa saya, beberapa anggota jemaat di GKJW Maron menjadi sasaran dari program raskin yang dicanangkan pemerintah.

¹³ www.jatim.go.id, diakses 20 Desember 2007.

agraris ditunjukkan oleh sumbangan angka pertumbuhan sektor pertanian 3,8% dari 5,80% angka pertumbuhan rata-rata di Jawa Timur. Angka ini tergolong masih rendah jikalau menilik jumlah tenaga kerja di sektor ini yang mencapai angka sekitar 48 %.

GKJW dan Pokok Persoalan Kemunduran Petani di Jawa Timur

Secara umum kemunduran agraris di Jawa Timur tidak jauh berbeda dengan kemunduran sektor pertanian di Indonesia. Jika diuraikan, sungguh panjang lebarlah permasalahannya. Tapi secara singkat ada empat pilar persoalan yang secara riil menghambat kemajuan pertanian, yaitu:

1. Petani menghadapi persoalan penguasaan sumber-sumber produktif pertanian yang semakin terpinggirkan. Tanah atau lahan, air atau masalah irigasi, sampai penguasaan benih semakin tidak mampu dikuasai oleh petani. Karena keterdesakan lahan-lahan pertanian bergeser diambil-alih menjadi lahan-lahan industri, pertambangan, dan pemukiman. Sumber-sumber air dikapitalisasikan, seperti kasus yang terjadi di daerah Pandaan, Jawa Timur, di mana sumber air dikuasai perusahaan air minum Aqua. Juga semakin berkurangnya sumberdaya hutan yang rusak menjadi pemicu menipisnya sumberdaya air bagi petani.
2. Dalam hal pembangunan pertanian berkelanjutan, petani dilemahkan oleh sistem pertanian modern yang berpangkal pada revolusi hijau. Sistem perbenihan, pupuk, dan pestisida dikuasai oleh industri dan sebagian besar petani sudah terjatuh di dalamnya.
3. Perdagangan yang adil menjadi persoalan mendasar yang dihadapi petani sehari-hari. Pada masa panen selalu terjadi bahwa harga produksi pertanian di tingkat petani rendah, sementara ketika dibutuhkan harga yang dibeli petani selalu tinggi. Termasuk harga beras maupun sarana produksi pertanian yang diperlukan petani seringkali mencekik leher petani.
4. Pengutamaan sistem pangan nasional yang berbasis impor. Hal ini menjadi masalah besar bagi kemandirian dan ketahanan pangan petani dalam negeri.

Keempat persoalan di atas merupakan persoalan pokok yang dihadapi petani. Secara sistematis dan siklikal, keempat persoalan tersebut berakar pada persoalan struktural maupun kultural. Akar struktural terjadi karena kebijakan negara atau pemerintah yang tidak berpihak kepada petani, melainkan kepada industri besar nasional maupun transnasional kapitalis yang secara sistematis menindas petani. Persoalan kultural, yang juga dipicu kebijakan struktural, bersumber pada pelaksanaan revolusi hijau yang meminggirkan kultur usaha

pertanian lokal yang berbasis ekologi setempat dengan teknologi lokal dan pertanian organis. Kenyataan ini menyebabkan kultur budidaya petani menjadi tergantung oleh input pertanian yang bersumber dari luar. Petani menjadi tergantung kepada sarana pertanian yang harus dicukupi oleh pihak di luar sumber daya mereka, yang berasal dari industri. Padahal kehadiran industri pertanian seringkali tidak mendukung kemandirian petani. Empat persoalan petani di atas, yang berakar pada dimensi struktural dan kultural, adalah persoalan pokok yang dihadapi dunia agraris secara nyata.

Kegagalan GKJW Membangun Peran di Sektor Agraris

Bergesernya peran GKJW dalam sektor agraris yang menjadi basis konteksnya ini bisa jadi karena di masa lalu Gereja terbius terlalu mengandalkan peran Negara Orde Baru yang berhasil mengembangkan sektor pertanian paska tahun 1970-an. Namun tampaknya GKJW sama sekali tidak mengantisipasi pergeseran kebijakan Pemerintah setelah tahun 1987 yang secara drastis mengalihkan kebijakannya pada program industrialisasi non-pertanian. Sehingga dalam kurun waktu itu memudarlal peran GKJW di sektor pertanian. Sebenarnya agak sulitlah menelusuri penyebab pudarnya peran GKJW di sektor pertanian ini. Tetapi mengingat bahwa kemunduran peran di bidang agraris itu juga diikuti oleh kemunduran peran di berbagai bidang sosial, termasuk bidang pendidikan maupun kesehatan, saya rasa selain diarahkan pada faktor teologi, penelusurannya haruslah juga dikaitkan pada masalah pendidikan warga Gereja.

Analisis Faktor Teologis

Jika dianalisis menurut pikiran teologis, beberapa pihak menyatakan bahwa penyebab kemunduran GKJW dalam berperan di sektor agraris maupun sektor sosial, dikarenakan corak pietis yang sangat kuat di GKJW. Corak pietis dari kalangan Emde yang kurang peduli terhadap keadaan sosial menggusur corak sosial agraris yang berakar pada teologi Coolen. Pandangan tersebut diakui oleh Dr. Bambang Ruseno Utomo yang menyatakan bahwa dalam perkembangannya ternyata pengaruh pendekatan Emde yang disebutnya *westernized* dan *pietistic* menjadi teologi yang mengurati dalam tubuh GKJW¹⁴. Model teologi pietis ini diakui mengakibatkan GKJW secara kelembagaan mulai dari tingkat Majelis Agung, Majelis Daerah, hingga tingkat individualistik warganya, pendeta dan majelis mengalami keterbelahan jiwa. Di mana secara sosiologis mereka dituntut untuk selaras dengan konteksnya, tetapi secara teologis dan budaya harus konfrontatif terhadap budayanya maupun pemeluk agama lain¹⁵.

¹⁴ Bambang Ruseno Utomo, *GKJW Kini dan Kedepan*, Makalah Seminar HUT GKJW Ke-75, hal. 6.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 6.

Ini sungguhlah bertolak belakang dengan corak teologi Coolen yang berani merasuk dalam wadah kultur dan konteks setempat yang mampu berpengaruh pada etos kerja masyarakat Kristen di pedesaan seperti yang diungkapkan van Akkeren yang saya sebut di atas. Teologi Coolen mampu mewujudkan gereja yang terbuka dan berani melintas batas secara sosial. Sementara dengan teologi pietis yang anti sosial, gereja menjadi tertutup terhadap berbagai perkembangan di masyarakat dan tidak memiliki kepekaan sosial karena berorientasi vertikal-internal.

Akar masalah kerangka teologis yang menyebabkan kemunduran peran GKJW ini juga bisa dijelaskan menurut kajian van Akkeren yang berhasil memetakan empat golongan Kristen di dalam tubuh GKJW¹⁶, yaitu golongan kiri progresif, golongan kiri konservatif, golongan kanan progresif, dan golongan kanan konservatif. Golongan kiri progresif adalah kalangan jemaat atau pemimpin Kristen yang mampu mempertahankan kemandirian desa Kristen dan tidak tergantung selama periode perwalian misionaris dengan menimba pengalaman dari sumber tradisi-tradisi desa otonom yang memiliki adat hasil binaan pengolahan sawah dan mendialogkannya dengan Injil. Golongan ini menjadikan agama Kristen menjadi agama setempat atau agama Kristen-Jawa. Peranan para aktornya secara sosial seperti peranan Coolen di Ngoro. Tokohnya selain Ibrahim Tunggul Wulung adalah Tartib Eprayim yang menjadi utusan GKJW dalam keberhasilan misi di Bali, dan Wiryosudarmo yang pada tahun 1950-an menciptakan model perhimpunan karya sosial orang-orang Kristen melalui perkemahan dan membaktikannya kepada lingkungan orang-orang bukan Kristen. Mereka yang dipetakan dalam golongan ini adalah yang mampu mengejawantahkan konsep Yesus sebagai Ratu Adil dengan riil melalui bidang pekerjaan agraris tetapi sedikit melupakan organisasi sosialnya karena lebih menonjolkan aspek kemandirian dalam pergerakannya.

Golongan kedua, golongan kiri konservatif adalah mereka yang mengidentifikasi diri dalam penalaran agraris dan hidup dalam konteks sosial, tetapi tidak mandiri dari pengaruh misi maupun organisasi dan pranata sosial setempat dalam mengekspresikan Kristus dan kekristenannya secara lokal menurut budaya setempat. Ini terjadi pada para pemimpin Kristen yang menciptakan pranata desa yang kuat seperti di Desa Mojowarno maupun di Desa Wonorejo, sebuah desa Kristen di Malang Selatan, yang mampu mendidik desa-desa Kristen dalam rangka tugas sosial ekonomi memajukan desa.

Sementara golongan sayap kanan mencerminkan kelompok pandangan bahwa Gereja berasal dari sesuatu yang bukan Jawa dan yang asing, serta yang akan dan harus tetap merupakan sesuatu yang asing di desa. Golongan ini adalah kelompok yang cenderung melembagakan seluruh jabatan-jabatan di dalam Gereja. Pola institusional yang formal merupakan ciri khas kelompok ini. Golongan kanan progresif memang masih mendasarkan pada mistik Jawa sebagai usaha menyatu dengan konteksnya, tetapi dalam berbagai hal masih dipengaruhi

¹⁶ Philip van Akkeren, *Dewi Sri dan Kristus*, (Jakarta:1994), hal. 231.

pietisme. Sedangkan golongan kanan konservatif bercirikan pietisme yang lebih kuat di mana mereka mengarahkan kelembagaan Gereja pada urusan internal dan menciptakan formalisme yang kuat.

Dari peta van Akkeren inilah sebenarnya kita bisa menduga dan menyimpulkan bahwa kegagalan Gereja GKJW berperan dalam konteks agraris kemungkinan besar disebabkan karena golongan sayap kanan, terutama kelompok kanan yang konservatif, semakin banyak lahir dan bekerja di dalam Gereja. Sementara mereka yang berakar pada golongan kiri seperti di atas, yang walaupun aktif di Gereja, kemungkinan tersisih, kalah suara, atau bahkan terlempar keluar dari Gereja. Disadari atau tidak pergeseran peran yang melemah pada sektor agraris salah satunya dimungkinkan akibat GKJW menjadi Gereja yang sangat hierarkhis dalam menonjolkan formalisme dan institusionalisme dalam bergereja seperti yang nyata terjadi.

Visi Gereja yang Kurang Jelas

Kegagalan peran dalam sektor agraris ini juga tercermin dari visi gereja yang tidak jelas menghadapi konteksnya. Dalam Tata dan Pranata GKJW yang dirumuskan semenjak Sidang Majelis Agung tahun 1989, yang berlaku sekarang, sama sekali tidak menyinggung visi yang kontekstual menyangkut keberadaan GKJW di Jawa Timur. Seperti tertera pada Pasal 4 Tata Greja Kristen Jawi Wetan yang disahkan penggunaannya pada tahun 1996, visi GKJW masih berkutat pada rumusan yang abstrak:

Pasal 4

1. Greja Kristen Jawi Wetan dipanggil oleh Tuhan Allah untuk ikut serta melaksanakan rencana karya-Nya di dunia ini.
2. Greja Kristen Jawi Wetan dipanggil oleh Tuhan Allah untuk juga bertanggung jawab atas pemberlakuan kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera bagi masyarakat, bangsa dan negara.¹⁷

Rumusan visi GKJW yang abstrak juga tampak dari Bab V tentang wujud nyata GKJW, seperti dituliskan berikut ini:

BAB V WUJUDNYATA

Wujud nyata Greja Kristen Jawi Wetan Pasal 8

¹⁷ *Tata dan Pranata*, Majelis Agung GKJW, 1996, hal. 5.

Wujud nyata Gereja Kristen Jawi Wetan nampak dalam adanya ibadah, pemberitaan firman Tuhan Allah, pelayanan sakramen, warga dan persekutuan-persekutuan.¹⁸

Rumusan visi untuk mewujudkan gerak GKJW yang kurang jelas ini saya kira juga menjadi salah satu penyebab tidak fokusnya peran GKJW memberi sumbangan pada sektor agraris. Bukankah rumusan di atas secara otomatis sudah merupakan fungsi dari gereja yang mendasar, dan bukan sebagai wujud nyata hakikat gereja sebagai pernyataan Rahmat Allah dalam konteksnya di Jawa Timur.

Penafsiran tentang Yesus Kristus yang visioner kontekstual pada masa Coolen maupun ketika golongan sayap kiri masih berperan kuat, sungguh jelas bagi konteks agraris. Yesus Kristus secara visioner diletakkan di dalam konteks agraris untuk menyapa alam dan kosmologi setempat, juga ditempatkan sebagai yang lebih berkuasa daripada Dewi Sri dalam menjamin kesuburan dan produktifitas sawah¹⁹. Namun sayangnya Kristologi lokal²⁰ agraris yang sangat menyapa semacam ini melenyap begitu saja dari konteks Gereja GKJW dan tidak ada formula Kristologi agraris yang baru padahal sekarang konteksnya masih dilingkupi dunia pertanian.

Bandingkan saja visi GKJW di atas dengan Gereja-gereja Katolik yang setiap keuskupan merumuskan visi sesuai konteks yang dihadapinya secara lebih konkret. Misalnya saja kita bisa membandingkan rumusan visi GKJW tersebut dengan memperhatikan rumusan visi Keuskupan Palangkaraya yang berbunyi:

Gereja yang hidup dalam kasih karunia Allah mewujudkan imannya akan Tuhan dalam keterlibatannya meningkatkan harkat manusia dan melestarikan alam.²¹

Visi di atas sangat jelas mampu dijangkau karena sesuai dengan konteks Kalimantan Tengah yang menghadapi masalah kemiskinan dan berbagai masalah ekologis kerusakan hutan.

Saya kira visi yang dalam konteks lokal tidak jelas tersebut juga berlanjut dalam model-model Pendidikan Teologi Warga Gereja. Pendidikan Teologi Warga Gereja di GKJW rupa-rupanya menjadi tidak lagi menyentuh akar kontekstualnya. Pendidikan Teologi Warga Gereja termasuk katekisasi di dalamnya masih berkutat pada persoalan doktrin dan dogmatika, belum menjadi sebuah katekisasi sosial atau Pendidikan Teologi Warga Gereja yang kontekstual. Pendidikan Teologi Warga Gereja dipisahkan dari kebutuhan komunitas. Sayangnya dalam hal ini saya tidak punya data lengkap mengenai persoalan

¹⁸ *Tata dan Pranata*, Majelis Agung GKJW, 1996, hal. 6.

¹⁹ Philip van Akkeren, *Dewi Sri dan Kristus*, (Jakarta:1994), hal. 280.

²⁰ Tentang apa itu Kristologi lokal, selengkapnya lihat: P. Yoseph Subhan Hayon, *Membuat Kristologi Lokal: Metode dan Kriteria Evaluasi dalam Spektrum* No. 3&4 Tahun XXXIV, 2006.

²¹ A.M. Sutrisnaatmaka, *Penyesuaian Liturgi (Ekaristi) dalam Arus Habitus Baru: Syering dari Keuskupan Palangkaraya dalam Liturgi Autentik dan Relevan* (Bernardus Boli Ujan dan Georg Kirchberger (ed.), (Mauere: 2006), hal. 79.

pendidikan Kristiani di GKJW, sehingga saya tidak bisa menguraikan hal ini lebih mendalam.

Langkah yang Harus Ditempuh GKJW Mengusahakan Peran Agraris Prasyarat Mendasar: Refleksi Teologis dan Pastoral yang Visioner Bagi Petani

Beberapa tahun belakangan ini secara sporadis di dalam tubuh GKJW mulai lahir upaya-upaya untuk mengembalikan perannya di sektor pertanian. Seperti pada tahun 2007 kemarin Dewan Pembinaan Penatalayanan GKJW mulai mengupayakan kepedulian terhadap kaum tani dengan merintis dibentuknya Forum Pertanian GKJW. Pemberdayaan ekonomi warga di pedesaan dilaksanakan di Majelis Daerah Malang II dengan dibentuknya kelompok swadaya jemaat mengembangkan ternak kambing, sapi, dan lain-lain. Dirintis Pdt. Iwan Kurniawan, S.P., jemaat GKJW Tunjungrejo beberapa tahun terakhir berhasil mengembangkan agribisnis bunga.²² GKJW Sumbergondang, Lamongan, dirintis oleh Pdt. Sutriyo mengembangkan peternakan sapi untuk memberdayakan warga petani yang miskin. Meskipun bukan buah karya dari lembaga gereja, kemandirian petani Desa Kristen Peniwen membangun pertanian organik bisa menjadi contoh gerakan pertanian yang perlu ditindaklanjuti gereja.

Tetapi ada hal yang konkret yang harus dilakukan Gereja GKJW secara kelembagaan. Upaya itu adalah merumuskan visi gereja yang membumi, visi tentang Kerajaan Allah yang konkret terhadap konteks agraris di Jawa Timur. GKJW perlu kembali merumuskan visinya lebih riil, sehingga dengan visi yang jelas menjadi panduan bagi diwadahnya dan dijalankannya kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan sektor agraris oleh dan bagi Jemaat GKJW, maupun bagi masyarakat petani di Jawa Timur. Dengan pernyataan visi yang jelas, secara kelembagaan GKJW juga akan memberi ruang bagi keterlibatan golongan sayap kiri di dalam Gereja, seperti dalam peta van Akkeren di atas, yang biasanya kreatif dalam mengembangkan kegiatan sosial. Dengan cara seperti ini secara kelembagaan GKJW mampu memperkuat prinsip *gereja gerakan warga*²³ dengan mengurangi bentuk institusionalisme dan formalisme di gereja atau secara fleksibel mewadahi partisipasi warga gereja bagi peningkatan konteks agraris dalam institusinya yang lebih organik.

Namun demikian secara kelembagaan revitalisasi peran GKJW haruslah dimulai dari transformasi di dalam anggota Majelis Agung. Hal ini terkait dengan bentuk struktur GKJW yang sinodal-presbiterial di mana Majelis Agung mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menetapkan kebijakan bagi struktur di bawahnya. Majelis Agung harus berani mentransformasi paradigma dan visinya

²² Bagian ini saya kutip dari makalah kelompok yang dipresentasikan ketika mendiskusikan konteks GKJW dalam Mata Kuliah Gereja dalam Konteks Indonesia, pada pertengahan November 2007 kemarin.

²³ Prinsip GKJW sebagai *gereja gerakan warga* secara ideal merupakan dasar GKJW dalam bergereja. Prinsip ini normatif selalu menjadi arah GKJW dalam memperkembangkan diri. Lihat *Buku Panduan PKP IV dan Prowil Kediri Selatan 2005-2010*, Greja Kristen Jawi Wetan Majelis Daerah Kediri Selatan, 2004, hal. 5-6.

untuk berani ber-*passing over* merasuk dalam konteks kehidupan agraris dan merumuskan peran sosial gereja berfokus dalam konteks agraris di Jawa Timur. Secara struktural para pihak di dalam kelembagaan GKJW harus berani bersepakat untuk berpihak kepada kehidupan petani dengan mendalami dan merumuskan teologi yang sesuai. Majelis Agung, ditantang secara radikal merumuskan dan mengorientasikan teologi, eklesiologi, dan misiologi GKJW yang lebih berguna bagi konteksnya yang didominasi masyarakat agraris.

Kegagalan peran karena dampak teologi pietisme, selayaknya menjadi pelajaran berharga dan membuat teologi ini seharusnya ditinggalkan dalam kelembagaan GKJW. Teologi yang mampu menjawab tantangan konteksnya, yaitu teologi yang menciptakan solidaritasnya terhadap masyarakat petani perlu segera disepakati sebagai landasan dan visi bergereja. Gereja GKJW, dengan mendalami dalam merumuskan visinya yang didasari rumusan teologi, eklesiologi, dan misiologi yang jelas bisa bercermin dari Pokok-pokok Ajaran Sosial Katolik yang telah melompat jauh dalam mengantisipasi konteks kehidupan yang nyata dihadapi Gereja. Sepuluh Pokok-pokok Ajaran Sosial Gereja Katolik itu adalah:

1. Kesatuan dimensi sosial dan ekonomi dalam kehidupan. Kehidupan sosial tidak sekular di luar rencana Allah, tetapi begitu erat menjadi dinamika bagian Kerajaan Allah.
2. Martabat pribadi manusia. Manusia diciptakan menurut gambaran Allah, pria dan wanita mendapat kedudukan utama dalam tatanan sosial, dengan mempunyai hak-hak yang tidak dapat dilepaskan di bidang hukum, politik, sosial, dan ekonomi.
3. Mengutamakan kaum miskin. Cinta kasih harus ditampilkan secara istimewa kepada kaum miskin yang kebutuhan-kebutuhan dan hak-haknya mendapat perhatian istimewa di mata Allah. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang secara ekonomis ada dalam keadaan yang tidak beruntung. Sebagai konsekuensi dari statusnya yang rendah, mereka tertindas dan lemah.
4. Cinta kasih dan keadilan adalah satu kesatuan. Mencintai sesama merupakan tuntutan mutlak dari keadilan, karena cinta kasih menyatakan dirinya dalam tindakan-tindakan nyata dan dalam tatanan struktural masyarakat yang menghormati martabat manusia, melindungi hak-hak asasi dan mempermudah jalan bagi perkembangan manusia. Menegakkan keadilan berarti merombak struktur-struktur yang menghambat⁶ perwujudan cinta kasih.
5. Mewujudkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum adalah seluruh kondisi kehidupan sosial dari aspek ekonomi, politik, maupun kebudayaan yang memungkinkan setiap orang mencapai kesempurnaan kemanusiaannya.

6. Partisipasi politik. Keterlibatan demokratis dalam ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan merupakan cara yang terbaik untuk menghormati martabat dan kebebasan masyarakat.
7. Keadilan ekonomi. Ekonomi adalah bagi masyarakat seluruhnya dan sumber-sumber alam harus dibagi secara merata bagi semua.
8. Kepengurusan. Semua mempunyai fungsi sosial.
9. Solidaritas universal. Seluruh dunia merupakan satu keluarga umat manusia dan dengan demikian semua anggotanya mempunyai kewajiban timbal balik dalam mewujudkan perkembangan seluruh bangsa manusia di seluruh dunia.
10. Menciptakan perdamaian. Perdamaian merupakan buah keadilan dan sangat tergantung pada tatanan yang benar antarmanusia dan bangsa-bangsa.²⁴

Saya kira usaha itu adalah pintu bagi lembaga sebesar GKJW untuk bisa berperan dan ikut ambil bagian memecahkan pokok-pokok persoalan yang dihadapi petani dan mendorong pemberdayaan bagi masyarakat di desa-desa Kristen Jawa Timur. Tanpa usaha ini, maka usaha-usaha gereja di bidang agraris hanya menjadi usaha yang sporadis dan tidak memiliki kesinambungan.

Langkah Kedua : Menjadi Gereja yang Terbuka dan Berjejaring

Usaha di atas juga menjadi landasan gereja masuk dalam masyarakat, dan berjejaring dengan berbagai elemen baik LSM atau organisasi non-pemerintah maupun dengan lembaga keagamaan lain, seperti NU di Jawa Timur yang hubungannya sudah terjalin erat melalui program kegiatan GKJW mewujudkan persaudaraan sejati. Dengan berjejaring maka usaha bersama-sama mengurus persoalan agraris di masyarakat akan menjadi lebih efektif dan memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan bila usaha itu dilakukan sendiri baik dalam memberikan sumbangan pemikiran terhadap negara, dalam peran pendampingan terhadap petani, maupun dalam peran-peran lainnya. Usaha ini juga menjadi satu upaya mewujudkan komunitas basis antar iman di pedesaan.

Forum Petani GKJW yang telah dirintis pembentukannya, merupakan wadah membangun jaringan internal GKJW. Di mana melalui forum ini para petani dari berbagai desa-desa Kristen atau jemaat Kristen GKJW di pedesaan bisa saling menghubungkan diri dan membangun komitmen-komitmen dalam rangka memperkembangkan pertanian mereka. Pola jaringan kedua dapat dilakukan dengan dibangunnya kemitraan antara gereja-gereja desa dengan gereja-gereja kota. Di mana pola jaringan semacam ini bisa memperkuat, baik dalam bidang pemasaran pertanian maupun bidang permodalan bagi petani pedesaan. Melalui pola semacam ini paling tidak para petani di desa bisa ditolong untuk

²⁴ Michael J. Schultheis dkk, *Pokok-pokok Ajaran Sosial Gereja*, (Yogyakarta: 1988), hal. 33-35.

menyalurkan produksinya dengan harga yang layak. Jaringan semacam ini bisa menjadi alternatif pasar yang lebih menguntungkan bagi petani dalam membangun perdagangan yang adil. Jaringan yang diperlukan GKJW untuk terlibat dalam konteks agraris mencakup banyak segi, dalam segi produksi untuk memperkuat teknik budidaya petani, segi permodalan dan pasar, maupun segi advokasi yang melindungi petani dari marginalisasi struktural maupun dari ketidakadilan yang disebabkan oleh aktor di luar mereka seperti pedagang atau tengkulak, juga oleh industri.

GKJW Sebagai Gereja Gerakan Petani

Keseriusan melaksanakan dua langkah di atas dengan konsisten tentu akan melahirkan GKJW sebagai gereja gerakan petani. Dua prasyarat di atas menjadi komitmen dasar bagi terwujudnya GKJW, yang berprinsip sebagai *gereja gerakan warga*, menjadi gereja gerakan petani. Tetapi dalam kasus GKJW, komitmen tersebut harus didukung dengan penyediaan perangkat seperti penyediaan tenaga kategorial gereja bagi pelayanan di bidang agraris. Sebab bagaimanapun juga gerakan semacam ini membutuhkan fokus dan aktor yang berkomitmen kuat sebagai mediator jaringan maupun pelestari gerakan yang memiliki mobilitas yang tinggi. Usaha mewujudkan gereja gerakan petani ini juga bisa dilakukan dengan usaha gereja melaksanakan pendidikan kategorial di kalangan petani. Masih banyak langkah-langkah yang bisa dirumuskan dan dilaksanakan oleh GKJW untuk memulihkan peran sosialnya dalam masyarakat agraris sesuai konteks agraris di Jawa Timur. Mungkin sebagian langkah tersebut sudah dilakukan GKJW meski masih parsial dan harus jatuh bangun mengalami berbagai kegagalan. Tetapi proses-proses mewujudkan gereja gerakan petani harus terus berjalan.

Daftar Bacaan

- Banawiratma, J.B dan J. Muller.1993. *Berteologi Sosial Lintas Ilmu: Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman*. Yogyakarta: Kanisius.
- Holland, Joe dan Peter Henriot. 1986. *Analisis Sosial dan Refleksi Teologis: Kaitan iman dan Keadilan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Majelis Agung GKJW. 1996. *Tata dan Pranata Greja Kristen Jawi Wetan dan Peraturan Majelis Agung Tentang Badan-badan Pembantu Majelis*. Malang: Diterbitkan oleh Majelis Agung GKJW.
- Mangunwijaya, Y.B. 1999. *Gereja Diaspora*. Yogyakarta: Kanisius.

Sobrino, Jon dan Juan Hernandez Pico. 1989. *Teologi Solidaritas*. Yogyakarta: Kanisius.

Schultheis, Michael J. dkk. 1988. *Pokok-pokok Ajaran Sosial Gereja*. Yogyakarta: Kanisius.

Van Akkeren, Philip. 1994. *Dewi Sri dan Kristus*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.